



Pengaruh Analisis Bantuan Sosial terhadap Pendapatan Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Wilayah Perkotaan di Lampung Tahun 2018-2022

Ukhti Ciptawaty^{1*}, Ambya², Ahmad Dhea Pratama³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ukhti.ciptawaty@feb.unila.ac.id

Abstract. *The increasing elderly population in Indonesia reflects progress in the health sector and improvements in quality of life; however, it also gives rise to increasingly complex social and economic challenges. Without adequate and sustainable policy support, older adults are at risk of becoming a vulnerable group facing limited access to resources and basic services. This study aims to comprehensively analyze the role of social security policies and public expenditure in improving the welfare of low-income elderly at the district level. Grounded in Social Welfare Theory and the concept of income distribution, this study emphasizes the importance of economic protection as a strategic effort to reduce poverty in old age. The method employed is a quantitative approach based on community-level randomized intervention with a pre- and post-program design to measure impacts more accurately. Data were collected through surveys and in-depth interviews using instruments adapted from the Indonesia Family Life Survey (IFLS). Preliminary findings indicate that social assistance contributes significantly to meeting the basic needs of the elderly, particularly in food and non-food expenditures. Therefore, synergy among the government, families, and communities is essential to achieve healthy, independent, and productive elderly populations in a sustainable manner.*

Keywords: *Income Distribution; Poverty; Public Policy; Social Assistance; Social Welfare.*

Abstrak. Peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia mencerminkan kemajuan di bidang kesehatan dan kualitas hidup, namun juga memunculkan tantangan sosial dan ekonomi baru yang semakin kompleks. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai dan berkelanjutan, lansia berisiko menjadi kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran kebijakan jaminan sosial dan belanja publik dalam meningkatkan kesejahteraan lansia berpenghasilan rendah di tingkat kabupaten. Berlandaskan Teori Kesejahteraan Sosial dan konsep distribusi pendapatan, studi ini menekankan pentingnya perlindungan ekonomi sebagai upaya strategis untuk mengurangi kemiskinan pada usia lanjut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif berbasis intervensi acak komunitas dengan desain sebelum dan sesudah program untuk mengukur dampak secara lebih akurat. Data diperoleh melalui survei dan wawancara mendalam menggunakan instrumen yang mengacu pada Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS). Hasil awal menunjukkan bahwa bantuan sosial berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar lansia, terutama pada pengeluaran makanan dan non-makanan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, dan produktif secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial; Distribusi Pendapatan; Kebijakan Publik; Kemiskinan; Kesejahteraan Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Kesejahteraan ekonomi adalah konsep yang mengacu pada kesejahteraan material individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan, diukur dengan akses ke barang, jasa, dan sumber daya ekonomi yang memadai (Stiglitz et al., 2009). Kesejahteraan ekonomi melibatkan dua aspek utama, yaitu pendapatan dan konsumsi. Kapasitas individu atau rumah tangga untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan diukur dari pendapatan, konsumsi, dan daya beli. Standar hidup, mencakup berbagai dimensi kualitas hidup, seperti akses ke perumahan yang layak, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial lainnya. Kesejahteraan masyarakat atau individu pada fase lansia menarik untuk dibahas oleh peneliti atau akademisi. Tema semacam ini memiliki dua sisi penting, yakni meningkatnya

jumlah lansia yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di sisi lain, ada harapan/pertanyaan bagaimana lansia tidak menjadi beban bagi kelompok usia sebelumnya. Landasan teoritis yang dapat digunakan adalah Teori Kesejahteraan Sosial (Teori Kesejahteraan Sosial) adalah konsep ekonomi dan sosial yang menyoroti peran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan jaminan terhadap risiko ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh individu dalam masyarakat (Barr, 2020).

Teori ini berkembang dari kebutuhan untuk mengatasi ketidakpastian yang dialami oleh individu mengenai kesehatan, pengangguran, kemiskinan, disabilitas, dan usia tua. Lansia merupakan kelompok yang berpotensi menjadi masyarakat yang rentan, sehingga diperlukan kondisi fisik dan non fisik yang mendukung untuk meningkatkan kesehatannya. Pada dasarnya, lansia di berbagai negara, termasuk Indonesia, diharapkan tidak hanya memiliki umur panjang tetapi juga dapat hidup di hari tua yang sehat dan tetap berkontribusi dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk memenuhi kebutuhan lansia sejak usia dini, (K. F. Nugraheni, R., & Hardini, 2017). Peningkatan jumlah populasi lansia mencerminkan keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan, tetapi pada saat yang sama merupakan tantangan dalam pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, menjelaskan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Penuaan, yang dimaksud dengan lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun.

Data BPS menunjukkan bahwa populasi lansia di Indonesia pada tahun 2000 adalah 14.439.967 orang (7,18%); Peningkatan jumlah penduduk lansia antara lain disebabkan oleh meningkatnya tingkat sosial ekonomi masyarakat, kemajuan di bidang pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat pengetahuan masyarakat (Deputi I Kementerian Pendidikan, 2008). Pada tahun 2010 jumlah lansia meningkat menjadi 23.992.553 orang (9,77%); Pada tahun 2020, jumlah lansia mencapai 28.822.879 orang (11,34%); dan pada tahun 2023 akan meningkat menjadi 11,75%, dan pada tahun 2045 diproyeksikan oleh BPS (2023) menjadi 20,3%. Memperhatikan data, terjadi peningkatan jumlah lansia pada setiap periode dekade. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejauh ini, lansia dianggap kurang produktif dalam kehidupan di masyarakat, namun ditemukan bukti bahwa keterlibatan dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga memiliki dampak positif yang signifikan bagi lansia, (Anita, 2018). Keluarga yang memberikan dorongan, perhatian dan motivasi dapat meningkatkan semangat hidup positif

pada lansia dalam menjalani kehidupan di masa tuanya. Keluarga adalah orang terdekat sehingga keluarga memiliki peran yang berpengaruh dalam kehidupan lansia. Bagi pemerintah, sarana dan prasarana bagi lansia dapat ditingkatkan seperti transportasi untuk memudahkan lansia, fasilitas penunjang bagi lansia dan pemberdayaan lansia yang masih potensial.

Data demografi yang menunjukkan bahwa total populasi mencapai 9.522,91 ribu individu, di mana 1.081,64 ribu di antaranya tergolong lansia, mewakili sekitar 11,36 persen dari keseluruhan populasi. Proporsi ini mencerminkan pergeseran demografis menuju penuaan populasi, yang membawa implikasi sosial ekonomi yang signifikan, terutama dalam konteks keberlanjutan angkatan kerja, sistem perlindungan sosial, dan penyediaan perawatan kesehatan. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa 199,33 ribu individu merupakan penerima program bantuan non tunai, yang merupakan sekitar 2,09 persen dari total populasi. Proporsi penerima manfaat yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan populasi lansia menunjukkan potensi kesenjangan dalam cakupan dan penargetan efektivitas skema bantuan sosial. Dari perspektif kebijakan, angka-angka ini menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan merancang program kesejahteraan yang lebih inklusif yang secara memadai memenuhi kebutuhan populasi yang menua sambil memastikan bahwa kelompok rentan tidak dikecualikan dari mekanisme dukungan negara. Dinamika demografis dan kesejahteraan seperti itu sangat penting untuk mempertahankan pembangunan yang adil dan mengurangi ketimpangan sosial dalam jangka panjang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengeluaran jaminan sosial mempengaruhi pendapatan lansia di sektor informal perkotaan serta sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan mereka. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran jaminan sosial terhadap pendapatan lansia di sektor informal perkotaan dan menilai tingkat efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi lansia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Terkait

Dana pensiun merupakan instrumen keuangan untuk menjamin pendapatan di masa tua ketika individu tidak lagi produktif. Menurut Bodie et al. (2014), dana pensiun berfungsi sebagai jaminan sosial yang mendukung konsumsi lansia sekaligus mengurangi beban fiskal melalui tabungan jangka panjang yang dikelola profesional. Pendapatan pensiun juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi individu dan menekan risiko kemiskinan. Hal ini

sejalan dengan Barr & Diamond (2008) yang menyatakan bahwa sistem pensiun yang inklusif dapat menurunkan kemiskinan lansia dan kesenjangan pendapatan. Di Indonesia, program seperti Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari perlindungan sosial, meskipun cakupannya masih terbatas, terutama bagi pekerja informal (TNP2K, 2020). World Bank (2019) dan International Labour Organization (2018) juga menekankan pentingnya penguatan sistem pensiun untuk mendorong ekonomi inklusif, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan kemiskinan, khususnya pada kelompok usia lanjut.

Dalam konteks makroekonomi, dana pensiun juga memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan fiskal negara. Kebijakan fiskal yang efektif dapat memperkuat sistem perlindungan sosial melalui alokasi anggaran untuk program pensiun dan jaminan hari tua. Menurut Musgrave & Musgrave (1989), belanja pemerintah untuk program pensiun merupakan bagian dari redistribusi pendapatan yang mendukung keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Di Indonesia, kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan dana untuk mendukung program pensiun bagi pegawai negeri sipil, serta subsidi untuk BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa peran fiskal tidak hanya bersifat stabilisasi, tetapi juga distributif. Namun, tantangan fiskal Indonesia ke depan adalah bagaimana memperluas cakupan program pensiun ke sektor informal tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Seperti diungkapkan oleh World Bank (2021), reformasi fiskal yang inklusif harus mempertimbangkan efisiensi pengeluaran sosial, kesinambungan fiskal, serta keberlanjutan pembiayaan pensiun di tengah tekanan demografis akibat penuaan penduduk. Oleh karena itu, desain kebijakan pensiun yang terintegrasi dengan strategi fiskal jangka panjang akan menjadi krusial untuk menurunkan angka kemiskinan secara struktural, terutama bagi kelompok usia non-produktif.

Keterkaitan antara dana pensiun, kebijakan fiskal, dan program penanggulangan kemiskinan tercermin dalam sistem perlindungan sosial terpadu. Pendapatan pensiun berperan sebagai pencegah kemiskinan jangka panjang bagi lansia, sementara kebijakan fiskal mendanai berbagai program bantuan sosial seperti pensiun non-kontributif dan bantuan tunai. Menurut Barrientos (2013), kombinasi kebijakan pensiun dan transfer fiskal yang tepat sasaran mampu menjaga konsumsi rumah tangga miskin sekaligus mengurangi kemiskinan antar generasi. Di Indonesia, program seperti BSLU dan pensiun PNS menunjukkan peran penting fiskal negara, meskipun efektivitasnya bergantung pada cakupan dan besaran manfaat. Studi TNP2K (2020) juga menunjukkan bahwa intervensi fiskal yang tepat sasaran

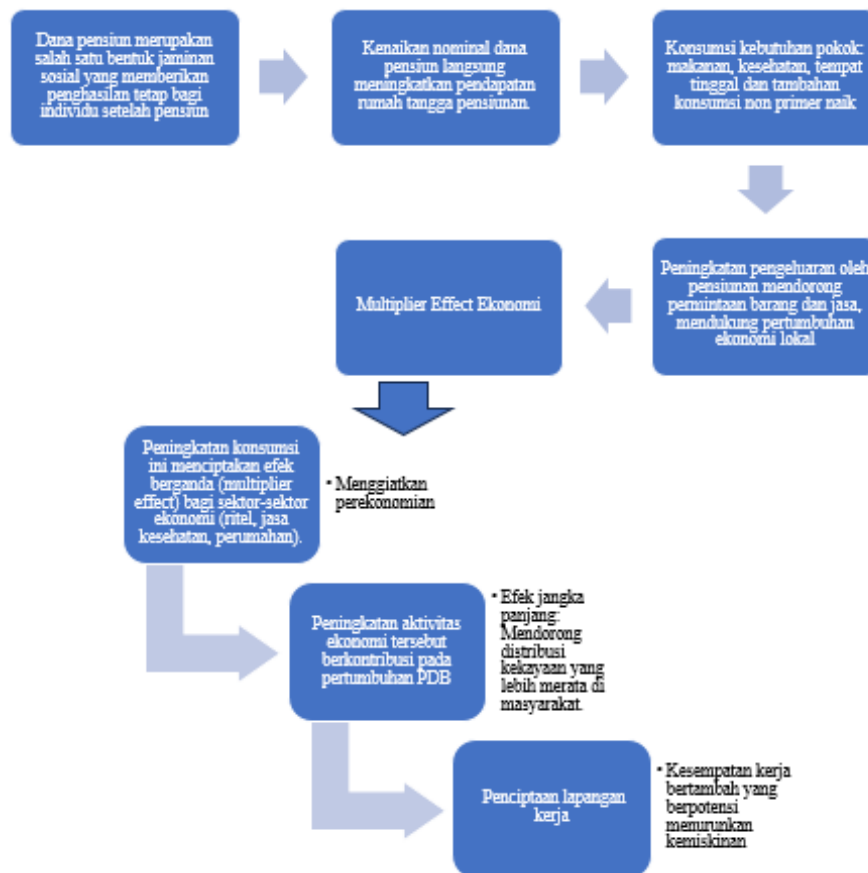
dapat menurunkan kemiskinan hingga 2–3 persen, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan fiskal dan sistem pensiun untuk menciptakan program yang berkelanjutan.

Dana Pensiun dan Kebijakan Fiskal

Dalam konteks ekonomi makro, dana pensiun juga erat kaitannya dengan kebijakan fiskal negara. Kebijakan fiskal yang efektif dapat memperkuat sistem perlindungan sosial melalui alokasi anggaran untuk program pensiun dan jaminan hari tua. Menurut Musgrave & Musgrave (1989), pengeluaran pemerintah untuk program pensiun adalah bagian dari redistribusi pendapatan yang mendukung keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Di Indonesia, kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan dana untuk mendukung program pensiun bagi pegawai negeri, serta subsidi bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS sebagai bentuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa peran fiskal tidak hanya stabilisasi, tetapi juga distributif. Namun, tantangan fiskal Indonesia ke depan adalah bagaimana memperluas cakupan program pensiun ke sektor informal tanpa membebani anggaran. Seperti yang diungkapkan oleh Bank Dunia (2021), reformasi fiskal inklusif harus mempertimbangkan efisiensi belanja sosial, keberlanjutan fiskal, dan keberlanjutan pembiayaan pensiun di tengah tekanan demografis akibat penuaan populasi. Oleh karena itu, desain kebijakan pensiun yang terintegrasi dengan strategi fiskal jangka panjang akan sangat penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara struktural, terutama bagi kelompok usia yang tidak produktif.

Keterkaitan antara dana pensiun, kebijakan fiskal, dan program pengentasan kemiskinan tercermin dalam sistem perlindungan sosial terintegrasi. Pendapatan pensiun, baik dari skema jaminan sosial maupun tabungan mandiri, berfungsi sebagai instrumen pencegahan kemiskinan jangka panjang bagi lansia. Di sisi lain, kebijakan fiskal berperan penting dalam mendanai program bantuan sosial seperti pensiun non-kontributif, subsidi pangan, dan bantuan tunai bersyarat. Menurut Barrientos (2013), kombinasi kebijakan pensiun yang tepat sasaran dan transfer fiskal mampu menjaga konsumsi rumah tangga miskin sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Di Indonesia, program seperti Bantuan Sosial Lansia dan pensiun PNS menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial berbasis fiskal, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada cakupan dan besaran manfaat. Studi TNP2K (2020) menunjukkan bahwa intervensi fiskal melalui pensiun dan bantuan sosial dapat menurunkan kemiskinan hingga 2–3 persen jika tepat sasaran. Oleh karena itu, sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan sistem pensiun menjadi krusial untuk menciptakan program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan berdampak luas,

terutama di tengah penuaan penduduk dan dominasi sektor informal. Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran penelitian:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sampel penelitian adalah penduduk usia pension (lansia) di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Data dan Sumber Data.

Jenis Data dan Metode	Sumber Data
Tingkat Pendapatan	Data ini berasal dari hasil percakapan mendalam (in-depth interviews) dengan informan, seperti lansia, keluarga lansia, petugas panti sosial, atau pejabat terkait di instansi pemerintah. Pengambilan data menggali pandangan, pengalaman hidup, harapan, dan persepsi mengenai kesejahteraan dan produktivitas lansia
Tingkat Konsumsi	Data ini berasal dari hasil percakapan mendalam (in-depth interviews) dengan informan, seperti lansia, keluarga lansia, petugas panti sosial, atau pejabat terkait di instansi pemerintah.
Sumber Pendapatan	Data yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap aktivitas dan kondisi kehidupan lansia, baik di rumah, komunitas, maupun panti sosial. Misalnya, observasi perilaku lansia dalam kegiatan produktif atau interaksi sosial mereka
Data dari Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)	Pendapat dan gagasan yang muncul dari diskusi kelompok antara berbagai pemangku kepentingan

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini berfokus pada kabupaten sebagai unit analisis utama untuk bantuan sosial bagi penduduk lansia berpendapatan rendah. Pengeluaran makanan dan non makanan telah memainkan peran utama dalam pembiayaan dan penyediaan kebutuhan bagi penduduk lansia keluarga berpenghasilan rendah. Wawancara dari survei menunjukkan bahwa makanan dan non makanan adalah pengeluaran yang paling banyak didukung dari bantuan sosial bagi lansia. Data tersebut diambil dari penelitian primer berupa wawancara dan survei berdasarkan pertanyaan yang diadopsi Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS). Pengambilan sampel untuk penerima transfer tunai didasarkan pada intervensi acak berbasis komunitas dengan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi program. Ada empat distrik yang diselidiki dalam penelitian ini; Sukarame, Langkapura, Way Halim dan Labuhan Ratu. Kecamatan tersebut memiliki jumlah keluarga berpenghasilan rendah yang paling banyak. Data spasial penerima bantuan sosial telah dihasilkan dengan mengubah data tabular menjadi format shapefile. Penelitian ini akan mengambil sampel dari penerima bantuan sosial dan tersebar di Kota Bandar Lampung

Metode Analisis dan Model Regresi

Uji-t sampel berpasangan, kadang-kadang disebut uji-t sampel dependen, adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata antara dua set pengamatan adalah nol. Uji-t berpasangan, juga disebut sebagai uji-t sampel berpasangan atau uji-t dependen, digunakan untuk menentukan apakah rata-rata variabel dependen sama dalam dua kelompok terkait.

Asumsi Tes t Berpasangan

Ada empat asumsi yang mendukung uji-t berpasangan; (1) variabel dependen harus diukur pada tingkat interval atau rasio, (2) variabel independen harus terdiri dari dua kategori, "kelompok terkait" atau "pasangan yang cocok"; (3) seharusnya tidak ada outlier yang signifikan dalam perbedaan antara dua kelompok terkait; dan (4) distribusi perbedaan variabel dependen antara dua kelompok terkait harus kira-kira didistribusikan secara normal.

Pedoman pengambilan keputusan dalam Tes T-T Berpasangan

Menurut Santoso (2014), pedoman pengambilan keputusan dalam uji-t berpasangan berdasarkan nilai signifikansi (Sig) hasil keluaran Stata, adalah sebagai berikut:

- a. Jika Sig. (berekor 2) $< 0,05$, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima.
- b. Sebaliknya, jika nilai Sig. (2 berekor) $> 0,05$, maka H_0 diterima, dan H_a ditolak.

Selain membandingkan nilai signifikansi (Sig) dengan probabilitas 0,05, cara lain untuk menguji hipotesis dalam uji-t sampel berpasangan adalah dengan memeriksa nilai t yang dihitung dengan tabel t. Pedoman atau dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitungan $>$ tabel t, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Sebaliknya, jika nilai t hitungan $<$ tabel t, maka H_0 disetujui, dan H_a ditolak.

Selain itu, berdasarkan tabel keluaran dapat diketahui hitungan nilai positif dan atau negatif. Nilai rata-rata pengeluaran konsumsi menyebabkan nilai t negatif ini sebelum bantuan pendanaan dari transfer tunai. Ini lebih rendah dari pengeluaran konsumsi rata-rata setelah mendapatkan bantuan keuangan dari transfer tunai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan Model Statistik

Hasil Perhitungan Statistik model pada Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif variabel sebelum dan sesudah perlakuan yang meliputi nilai rata-rata, jumlah sampel, standar deviasi, dan standar error. Selanjutnya, Tabel 3 menampilkan hasil uji *paired samples t-test* untuk mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Sementara itu, Tabel 4 menunjukkan nilai korelasi antara kedua kondisi tersebut yang menggambarkan kekuatan hubungan linear antar variabel sebelum dan sesudah perlakuan. berikut adalah hasil estimasi:

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	KS2A_SBLM	19.4348	46	8.89357	1.31129
	KS3A_SSDH	22.3478	46	10.76871	1.58776
Pair 2	KS_SBLM	1498478.261	46	798912.1142	117793.1649
	KS_SSDH	4676282.609	46	3857297.630	568727.5081
Pair 3	Transfer_SBLM	55173.9130	46	50136.83691	7392.27331
	Transfer_SSDH	60691.3043	46	55150.52060	8131.50064
Pair 4	HR_SBLM	1999655.913	46	1315541.538	193966.0178
	HR_SSDH	1817868.992	46	1195946.853	176332.7435
Pair 5	VRBL_A_SBLM	4839065.217	46	3965416.018	584668.6947
	VRBL_B_SSDH	9678130.435	46	7930832.036	1169337.389
Pair 6	VRBL_TYPE_A_B	5.9348	46	2.90901	.42891
	VRBL_TYPE_C_D	5.3696	46	2.87795	.42433

Gambar 2. Paired Samples Statistik.

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	KS2A_SBLM - KS3A_SSDH	-2.91304	7.26277	1.07084	-5.06982	-.75627	-2.720	45	.009
Pair 2	KS_SBLM - KS_SSDH	-3177804.35	3647652.948	537817.0860	-4261023.56	-2094585.13	-5.909	45	.000
Pair 3	Transfer_SBLM - Transfer_SSDH	-5517.39130	5013.68369	739.22733	-7006.27158	-4028.51103	-7.464	45	.000
Pair 4	HR_SBLM - HR_SSDH	181786.9215	119594.6846	17633.27425	146271.6841	217302.1589	10.309	45	.000
Pair 5	VRBL_A_SBLM - VRBL_B_SSDH	-4839065.22	3965416.018	584668.6947	-6016648.42	-3661482.02	-8.277	45	.000
Pair 6	VRBL_TYPE_A_B - VRBL_TYPE_C_D	.56522	1.62825	.24007	.08169	1.04875	2.354	45	.023

Gambar 3. Paired Samples Test.**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	KS2A_SBLM & KS3A_SSDH	46	.743	.000
Pair 2	KS_SBLM & KS_SSDH	46	.359	.014
Pair 3	Transfer_SBLM & Transfer_SSDH	46	1.000	.000
Pair 4	HR_SBLM & HR_SSDH	46	1.000	.000
Pair 5	VRBL_A_SBLM & VRBL_B_SSDH	46	1.000	.000
Pair 6	VRBL_TYPE_A_B & VRBL_TYPE_C_D	46	.842	.000

Gambar 4. Paired Samples Correlations.

Hasil uji perbedaan pada Pasangan 1 (KS2A) menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah bantuan pokok beras dengan nilai perbedaan rata-rata $-2,91$ ($SD = 7,26$), $t(45) = -2,72$, $p = 0,009$. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa kondisi setelahnya lebih tinggi dari sebelumnya dengan peningkatan rata-rata 2,91 unit. Ukuran efek yang diperoleh adalah pada kategori kecil hingga menengah ($d = -0,40$; $r = 0,376$), sehingga meskipun perubahan yang terjadi signifikan secara statistik, besarnya perubahan masih relatif moderat.

Pasangan 2 (KS) memperoleh perbedaan yang sangat signifikan dengan perbedaan rata-rata $-3,18$ juta ($SD \approx 3,65$ juta), $t(45) = -5,909$, $p < 0,001$. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan berupa uang tunai rupiah berupa konsumsi rumah tangga yang diberikan berdampak pada peningkatan yang signifikan. Angka negatif ini menunjukkan bahwa nilai setelahnya lebih besar dari nilai sebelumnya dengan selisih rata-rata $3,18$ juta rupiah. Ukuran efek perbedaan ini relatif besar ($d = -0,87$; $r = 0,661$), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perubahan yang kuat baik secara statistik maupun praktis.

Pasangan 3 (Transfer) juga menunjukkan perbedaan nilai makanan yang diberikan kepada pihak lain di luar rumah tangga dalam satu bulan dengan selisih rata-rata $-5.517,39$ ($SD \approx 5.013,68$), $t(45) = -7,464$, $p < 0,001$. Hal ini menunjukkan peningkatan nilai setelah $5.517,39$ (rupiah) dibandingkan sebelumnya. Ukuran efeknya sangat besar ($d = -1,10$; $r = 0,744$), menunjukkan bahwa dampak program atau perlakuan pada variabel transfer sangat kuat dan substansial.

Pasangan 4 (HR) menunjukkan penurunan yang signifikan setelah intervensi. Selisih rata-rata yang diperoleh adalah $+181.786,92$ ($SD \approx 119.594,68$), $t(45) = 10.309$, $p < 0,001$. Nilai positif tersebut menunjukkan bahwa kondisi setelah pembelian dan penjualan aset rumah tangga terhadap aset non usaha yang dimiliki oleh seluruh anggota rumah tangga ini selama 12 bulan terakhir lebih rendah dari kondisi sebelumnya dengan penurunan rata-rata sebesar 181.787 . Ukuran efek yang ditemukan sangat besar ($d = 1,52$; $r = 0,838$), menunjukkan bahwa perubahan ini tidak hanya signifikan secara statistik tetapi juga berdampak signifikan secara praktis. Hal ini penting untuk dieksplorasi lebih lanjut mengenai penyebab penurunan yang terjadi.

Pasangan 5 (VRBL_A vs VRBL_B) menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan perbedaan rata-rata $-4,84$ juta ($SD \approx 3,97$ juta), $t(45) = -8,277$, $p < 0,001$. Perbedaan ini menunjukkan peningkatan nilai pengeluaran sekolah selama 1 tahun terakhir dari seluruh anggota rumah tangga setelah $4,84$ juta dibandingkan sebelumnya. Ukuran efeknya juga sangat besar ($d = -1,22$; $r = 0,777$), sehingga perubahan yang terjadi dapat dianggap signifikan secara statistik baik secara statistik maupun substantif.

Pasangan 6 (VRBL_TYPE) menemukan perbedaan yang signifikan dengan perbedaan rata-rata $+0,565$ ($SD = 1,628$), $t(45) = 2,354$, $p = 0,023$. Nilai positif menunjukkan bahwa kondisi setelah pengalaman Anda kemarin mengalami penurunan rata-rata $0,565$ dibandingkan sebelumnya. Meskipun signifikan secara statistik, ukuran efeknya relatif kecil hingga sedang ($d = 0,347$; $r = 0,331$), sehingga perubahan yang terjadi relatif sedang.

Pembahasan dan Diskusi

Hasil pengujian yang berbeda menunjukkan perbedaan konsumsi beras yang signifikan setelah program bantuan diberikan. Dengan nilai perbedaan rata-rata $-2,91$ kg ($SD = 7,26$), $t(45) = -2,72$, $p = 0,009$, dan ukuran efek kecil hingga menengah ($d = -0,40$), terbukti bantuan ini mampu meningkatkan konsumsi beras rata-rata. Meskipun peningkatan ini tidak drastis, keberadaannya secara statistik nyata. Temuan ini konsisten dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa bantuan berupa bahan pokok, seperti beras, secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi pangan di tingkat rumah tangga, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan (Sumarto, 2021). Bantuan ini berfungsi sebagai jaring pengaman yang membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga alokasi anggaran mereka dapat dialihkan ke kebutuhan lainnya.

Analisis pada Pasangan 2 mengungkapkan perbedaan konsumsi rumah tangga yang sangat signifikan setelah menerima bantuan tunai. Dengan selisih rata-rata $-3,18$ juta rupiah ($t(45) = -5,909$, $p < 0,001$) dan ukuran efek yang besar ($d = -0,87$), jelas bahwa bantuan tunai memiliki dampak yang kuat dan substansial. Angka negatif ini menunjukkan peningkatan konsumsi yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa bantuan tunai lebih efektif daripada bantuan barang karena memberikan fleksibilitas kepada penerima untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak mereka. Sebuah studi oleh Rahmatika dan Susilowati (2022) menegaskan bahwa bantuan tunai seringkali memiliki efek pengganda yang lebih besar pada perekonomian rumah tangga, karena uang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang, membeli barang yang lebih beragam, atau berinvestasi di usaha kecil, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara lebih komprehensif.

Pasangan 3 menunjukkan bahwa bantuan program juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku sosial rumah tangga. Nilai rupiah makanan yang diberikan kepada pihak lain meningkat secara signifikan setelah intervensi, dengan selisih rata-rata $-5.517,39$ rupiah ($t(45) = -7,464$, $p < 0,001$) dan ukuran efek yang sangat besar ($d = -1,10$). Peningkatan ini menunjukkan bahwa penerima bantuan lebih cenderung berbagi sumber daya mereka dengan masyarakat luas. Fenomena ini dapat dilihat sebagai manifestasi solidaritas sosial di mana rumah tangga yang lebih beruntung membantu tetangga atau kerabat yang kurang beruntung, menciptakan efek riak positif di jejaring sosial mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Darmanto (2020), bantuan sosial seringkali tidak hanya mempengaruhi penerima langsung, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan praktik gotong royong di masyarakat.

Hasil pada Pair 4 menunjukkan tren yang kontradiktif dan signifikan, yaitu penurunan aset non-bisnis pasca program bantuan. Dengan selisih rata-rata +181.786,92 rupiah ($t(45)=10,309$, $p < 0,001$) dan ukuran efek yang sangat besar ($d=1,52$), temuan ini menunjukkan bahwa rumah tangga terpaksa melikuidasi atau menjual asetnya untuk memenuhi kebutuhan. Ini dapat terjadi bahkan jika mereka menerima bantuan, yang menunjukkan bahwa program tersebut mungkin tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran atau mengatasi tekanan keuangan yang parah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijaya dan Santoso (2023) yang menemukan bahwa dalam situasi krisis, rumah tangga seringkali harus mengorbankan aset jangka panjangnya (seperti perhiasan atau properti kecil) untuk menopang konsumsi jangka pendek. Oleh karena itu, penurunan aset ini bisa menjadi sinyal kerentanan ekonomi yang mendalam yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh program bantuan.

Tes perbedaan pada Pasangan 5 menunjukkan perbedaan pengeluaran biaya kuliah yang sangat signifikan setelah program. Dengan selisih rata-rata -4,84 juta rupiah ($t(45)=-8,277$, $p < 0,001$) dan ukuran efek yang sangat besar ($d=-1,22$), temuan ini menegaskan bahwa bantuan program secara efektif mendorong rumah tangga untuk meningkatkan investasi di bidang pendidikan. Peningkatan ini tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki dampak substantif yang kuat, karena investasi di bidang pendidikan adalah kunci untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi (Rahmatika & Susilowati, 2022). Hasil ini menunjukkan keberhasilan program dalam mempengaruhi prioritas pengeluaran rumah tangga menuju investasi masa depan yang lebih produktif. Pasangan 6, menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam variabel "pengalaman", dengan perbedaan rata-rata +0,565 ($t(45)=2,354$, $p=0,023$) dan ukuran efek kecil hingga sedang ($d=0,347$). Angka positif ini menunjukkan penurunan rata-rata variabel pengalaman setelah intervensi. Meskipun signifikan secara statistik, besarnya efeknya relatif moderat. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persepsi yang berbeda setelah mendapatkan bantuan atau perubahan kondisi subjektif yang tidak sepenuhnya ditangkap oleh variabel tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil tes yang berbeda menunjukkan bahwa program bantuan memiliki dampak yang signifikan dan multidimensi terhadap kondisi rumah tangga. Secara khusus, program ini efektif dalam meningkatkan konsumsi bahan pokok, pengeluaran untuk pendidikan, dan mentransfer bantuan kepada orang lain. Peningkatan ini sangat terasa, terutama pada variabel bantuan tunai dan pengeluaran sekolah, yang menunjukkan efektivitas

program dalam memenuhi kebutuhan dasar dan investasi jangka panjang rumah tangga. Namun, temuan kontradiktif tentang aset non-bisnis menunjukkan bahwa beberapa rumah tangga dipaksa untuk melikuidasi aset mereka, menunjukkan kerentanan ekonomi yang lebih dalam yang tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh program tersebut.

Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan intervensi lain yang lebih komprehensif. Untuk mengatasi masalah penurunan aset, pemerintah atau lembaga terkait dapat menyertakan program literasi keuangan, pelatihan keterampilan, atau dukungan untuk usaha mikro. Pendekatan holistik ini akan membantu penerima manfaat tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk membangun ketahanan ekonomi jangka panjang. Selain itu, penelitian kualitatif lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam alasan di balik penurunan aset non-bisnis dan bagaimana program dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh setiap rumah tangga.

DAFTAR REFERENSI

- Anjani, R. F., et al. (2017). Pengaruh hukum dan politik terhadap perkembangan investasi asing di Indonesia. *Serambi Hukum*, 10(2), 69–90.
- Asiedu, E. (2013). *Foreign direct investment, natural resources, and institutions* (Working Paper No. 3). International Growth Centre.
- Azman-Saini, W. N. W., Baharumshah, A. Z., & Law, S. H. (2010). Foreign direct investment, economic freedom, and economic growth: International evidence. *Economic Modelling*, 27(5), 1079–1089. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.04.001>
- Barr, N., & Diamond, P. (2008). *Reforming pensions: Principles and policy choices*. Oxford University Press.
- Bengoa, M., & Sanchez-Robles, B. (2003). Foreign direct investment, economic freedom, and growth: New evidence from Latin America. *European Journal of Political Economy*, 19(3), 529–545. [https://doi.org/10.1016/S0176-2680\(03\)00011-9](https://doi.org/10.1016/S0176-2680(03)00011-9)
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investments* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Busse, M., & Hefeker, C. (2011). Political risk, institutions, and foreign direct investment. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.704283>
- Darmanto, S. (2020). Solidaritas sosial dalam masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jis.v15i2.123>

- Dkhili, H., & Dhiab, L. (2018). The relationship between economic freedom and FDI versus economic growth: Evidence from GCC countries. *Journal of Risk and Financial Management*, 11(4), 81. <https://doi.org/10.3390/jrfm11040081>
- Duarte, L. D. R. V., Kedong, Y., & Xuemei, L. (2017). The relationship between FDI, economic growth, and financial development in Cabo Verde. *International Journal of Economics and Finance*, 9(5), 132. <https://doi.org/10.5539/ijef.v9n5p132>
- Dunning, J. H. (1997). The European market program and inbound foreign direct investment. *Journal of Common Market Studies*, 35(1), 1–3.
- Elheddad, M. M. (2016). Natural resources and FDI in GCC countries. *International Journal of Business and Social Research*, 6(7), 12–20. <https://doi.org/10.18533/ijbsr.v6i7.977>
- Gwartney, J. (2009). Economic freedom and cross-country differences in performance. *Southern Economic Journal*, 75(4), 937–956.
- Habibi, A., & Hidayat, W. R. (2017). Analisis pengaruh economic freedom terhadap foreign direct investment di negara ASEAN. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1).
- Heritage Foundation & Wall Street Journal. (2003). *Index of economic freedom*.
- Imtiaz, S. (2017). Economic freedom and foreign direct investment in South Asian countries. *Theoretical and Applied Economics*, 24(2), 277–290.
- International Labour Organization. (2018). *World social protection report 2017–19: Universal social protection to achieve the sustainable development goals*.
- Ito, T., & Krueger, A. O. (2000). Introduction to the role of foreign direct investment in East Asian economic development. In *The role of foreign direct investment in East Asian economic development* (pp. 1–8). National Bureau of Economic Research.
- Jafari-Samimi, A., Sadeghi, S., & Sadeghi, S. (2013). The relationship between foreign direct investment and tourism development: Evidence from developing countries. *Institutions and Economies*, 5(2), 59–68.
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Rajawali Pers.
- Jiang, W., & Martek, I. (2021). Political risk analysis of foreign direct investment into the energy sector of developing countries. *Journal of Cleaner Production*, 302, 127023. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127023>
- Jude, C., & Leveuge, G. (2017). Growth effect of foreign direct investment in developing economies: The role of institutional quality. *World Economy*, 40(4), 715–742. <https://doi.org/10.1111/twec.12402>
- Kim, H. (2010). Political stability and foreign direct investment. *International Journal of Economics and Finance*, 2(3), 59–71.

- Kok, R., & Ersoy, B. A. (2009). Analysis of FDI determinants in developing countries. *International Journal of Social Economics*, 36(1–2).
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2003). *Ekonomi internasional* (2nd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Kurečić, P., & Kokotović, F. (2017). The relevance of political stability on FDI: A VAR analysis and ARDL models. *Economies*, 5(3), 22.
- Marin, D., & Schnitzer, M. (2011). When is FDI a capital flow? *European Economic Review*, 55(6), 845–861. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2010.09.010>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Ndikumana, L., & Sarr, M. (2019). Capital flight, foreign direct investment, and natural resources in Africa. *Resources Policy*, 63, 101427. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101427>
- Olson, M. (1982). *The rise and decline of nations*. Yale University Press.
- Paton, R. (2018). *The effects of natural resource rents on FDI inflows* [Thesis]. University of Colorado Boulder.
- Plano, J. C. (1982). *The dictionary of political analysis*. ABC-Clio.
- Poelhekke, S., & van der Ploeg, R. (2012). Do natural resources attract FDI? Evidence from non-stationary sector-level data. SSRN *Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1950092>
- Rahmatika, A., & Susilowati, B. (2022). Efektivitas bantuan sosial dalam peningkatan akses pendidikan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 78–90. <https://doi.org/10.5678/jkp.v10i1.456>
- Rugman, A. M. (1981). A test of internalization theory. *Managerial and Decision Economics*, 2(4), 211–219. <https://doi.org/10.1002/mde.4090020402>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). *Natural resource abundance and economic growth* (NBER Working Paper No. 5398).
- Samimi, A. J., Monfared, M., Moghaddasi, R., & Azizi, K. (2011). Political stability and FDI in OIC countries. *Journal of Social and Development Sciences*, 1, 18–23.
- Sarwedi, S. (2002). Investasi asing langsung di Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4.
- Shahzad, A., Mithani, D. A., Al-Swidi, A., & Fadzil, F. H. (2012). Political stability and foreign direct investment inflows in Pakistan. *British Journal of Arts and Social Sciences*, 9(2).

- Sumarto, R. (2021). Dampak bantuan pangan terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(3), 112–128. <https://doi.org/10.9876/jep.v22i3.789>
- Tullock, G. (1980). *Efficient rent seeking*. In *Toward a theory of the rent-seeking society*. Edward Elgar.
- UNCTAD. (1998). *World investment report 1998: Trends and determinants*.
- Wei, S. J. (2000). How taxing is corruption on international investors? *Review of Economics and Statistics*, 82(1), 1–11.
- Wijaya, P., & Santoso, H. (2023). Strategi bertahan hidup rumah tangga miskin di masa krisis. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 18(4), 210–225. <https://doi.org/10.3456/jmk.v18i4.901>
- Woodward, D., & Rolfe, R. J. (1993). The location of export-oriented foreign direct investment in the Caribbean Basin. *Journal of International Business Studies*, 24(1), 121–144.
- Yustika, A. E. (2008). *Desentralisasi ekonomi di Indonesia: Kajian teoretis dan realitas empiris*. Bayumedia.
- Zghidi, N., Sghaier, I. M., & Abida, Z. (2016). Does economic freedom enhance the impact of foreign direct investment on economic growth in North African countries? *African Development Review*, 28(1), 64–74.